

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan sekumpulan bacaan yang menjadi sumber bacaan atau referensi yang dikumpulkan sesuai dengan topik yang akan dikaji untuk dianalisis. Adapun penelitian ini dibuat sesuai dengan keadaan di lapangan serta bersumber dari pengetahuan yang dijadikan *litelature review*. Kajian pustaka ini membahas teori-teori terkait dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti guna untuk mendukung pemecahan masalah yang sedang dianalisis. Teori dalam kajian pustaka ini digunakan sebagai acuan yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022 (Studi Kasus: Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah).

Sesuai dengan hal-hal yang peneliti jabarkan dalam kajian pustaka tersebut, peneliti pun mengidentifikasi *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory* sebagai landasan untuk mengkaji objek penelitian.

- a. *Grand Theory*, merupakan teori yang bersifat abstrak dan luas, serta mencakup konsep-konsep yang berlaku secara umum di berbagai konteks. Teori ini berfungsi untuk memberikan pandangan yang luas dan komprehensif terhadap fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, *Grand Theory* dapat digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan konsep-konsep yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Contoh *Grand Theory* yang relevan adalah teori sistem atau teori organisasi yang menjelaskan bagaimana suatu sistem pemerintahan bekerja dan berinteraksi.
- b. *Middle Theory*, lebih spesifik daripada *Grand Theory* dan berfokus pada penjelasan yang lebih terbatas dan terperinci. Teori ini membantu menghubungkan konsep-konsep dalam *Grand Theory* dengan konteks penelitian yang lebih spesifik. Dalam penelitian ini, *Middle Theory* dapat digunakan untuk mempelajari teori-teori dan model-model yang terkait dengan evaluasi kebijakan publik, seperti teori evaluasi

kebijakan, teori perubahan kebijakan, atau teori manajemen publik. *Middle Theory* membantu mengembangkan kerangka kerja yang lebih fokus dan relevan untuk analisis evaluasi kebijakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Bandung Tahun 2022.

- c. *Applied Theory*, adalah teori yang telah diadaptasi dan diterapkan secara khusus pada konteks penelitian yang konkret. Teori ini digunakan untuk mengkaji masalah-masalah praktis yang terkait dengan objek penelitian yang spesifik. Dalam penelitian ini, *Applied Theory* dapat merujuk pada teori-teori dan model-model evaluasi kebijakan publik yang telah dikembangkan dan diterapkan sebelumnya dalam konteks evaluasi kebijakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Misalnya, teori-teori evaluasi kinerja pemerintah atau evaluasi program dapat diadopsi dan digunakan untuk memahami proses evaluasi kebijakan dan kriteria yang relevan dalam kasus Kota Bandung Tahun 2022.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai penguat dalam penelitian ini, peneliti mencari serta mencantumkan referensi-referensi dengan substansi yang sama atau berkaitan dan berhubungan dengan penyajian penelitian terdahulu lainnya, sebagai perbandingan terhadap penelitian yang lain dengan konteks, tema, dan topik yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu terkait evaluasi kebijakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Bandung Tahun 2022 (Studi Kasus Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah).

Dalam hal ini, peneliti memilih 3 (tiga) penelitian terdahulu sebagai referensi atau acuan penelitian bagi peneliti untuk membantu pemecahan masalah, walaupun fokus dan lokusnya tidak sama persis seperti penelitian yang dibuat oleh peneliti. Maka, 3 (tiga) penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti yaitu:

Tabel 2. 1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Juwariyah Khusnah (2019)	Evaluasi Kebijakan Izin Reklame Di Kota Batam	Teori Evaluasi	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, dokumentasi dan observasi.
2.	Arif Siswadi (2019)	Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara		Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, dokumentasi dan observasi.
3.	Ratih Anggraeni, Soesilo Zauhar, Siswidiyanto	Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)		Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, Dokumentasi dan observasi.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

2.1.1.1 Penelitian oleh Juwariyah Khusnah dengan judul yang diambil “Evaluasi Kebijakan Izin Reklame Di Kota Batam”. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data yang diambil dengan tiga cara, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian tersebut, tujuan penelitian mengkaji mengenai hal tersebut, adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Kebijakan Izin Reklame Di Kota Batam dengan studi kasus di Badan Pengusaha Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan. Maka, hasil dari penelitian tersebut adalah untuk aturan-aturan atau kebijakan yang diberlakukan oleh Badan Pengusaha Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan terhadap stakeholder dan masyarakat dengan cara membuat kebijakan baru tentang sebuah sistem manajemen reklame (simrek) hal ini dapat memudahkan setiap orang untuk mengurus izin reklame, tanpa harus menunggu antrian yang panjang dan waktu yang padat, dengan cara melalui website online yang sudah disediakan oleh Badan Pengusaha Direktorat Kawasan, dengan begitu masyarakat tidak perlu mendatangi kantor, masyarakat cukup menggunakan website dan melengkapi persyaratan pengurusan izin reklame sesuai syarat-syarat yang diminta untuk prosedur pemuatan izin reklame, banyaknya masalah yang ditimbulkan dari reklame ilegal dan yang tidak mengikuti prosedural pembuatan izin reklame, yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat, sehingga dibuatkan kebijakan yang mengatur standart operasional agar ketahuan reklame- reklame yang tidak memiliki izin reklame.

2.1.1.2 Penelitian oleh Arif Siswadi dengan judul penelitian yang diambil yaitu, “Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara”. Metode penelitian yang diambil oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Dengan masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini adalah LPPD Provinsi Kalimantan Utara belum dapat sepenuhnya menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesungguhnya. Selain itu juga, Tim penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara cenderung mulai aktif dan peduli dalam pengisian kuisisioner LPPD menjelang akhir dan awal tahun saja.

Adapun teori yang digunakan untuk membahas evaluasi penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara adalah Teori Model evaluasi CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam dalam Arikunto (2008:40), yang menyatakan bahwa model evaluasi CIPP, terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu, *Context, Input, Process, dan Product*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk, mendeskripsikan, mendalami dan menganalisis evaluasi penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara dengan Tim penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Nasional EPPD. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dari Sekretariat Daerah Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal evaluasi konteks, penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara merupakan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan secara teknis masih diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat. Dukungan fisik dalam penyusunan LPPD ini tertuang dalam pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan adanya kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi, dan konsultasi, namun belum terlaksana secara maksimal. Evaluasi input diperoleh hasil, bahwa komitmen pimpinan perangkat daerah masih kurang maksimal, hingga duplikasi laporan sejenis yang sangat beragam, sedangkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana telah dialokasikan dan dilaksanakan. Terkait dengan evaluasi proses, pelaksanaan penyusunan LPPD disesuaikan dengan jadwal dan agenda yang telah disusun oleh Tim Penyusunan LPPD. Keterlibatan personil dalam penyusunannya melebihi alokasi staf yang ditugaskan. Penggunaan sarana dan prasarana telah diupayakan optimal sesuai dengan kemampuan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Evaluasi produk, diketahui bahwa LPPD Provinsi Kalimantan Utara telah disampaikan kepada pemerintah pusat secara tepat waktu, namun demikian dari sisi validitas laporan yang dihasilkan, belumlah sepenuhnya valid.

2.1.1.3 Penelitian oleh Ratih Anggraeni, Soesilo Zauhar, Siswidiyanto dengan judul Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan

Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 serta menilai hasil dari pelaksanaan implementasi pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian di BKD Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis dari Miles dan Huberman. Hasil penelittian ini adalah

1. Implementasi pengadaan anjungan mandiri kepegawaian berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan anjungan mandiri kepegawaian dapat diselesaikan tepat waktu sebelum tahun anggaran 2011 berakhir, namun proses pengadaan AMK lambat akibat perubahan rencana umum pengadaan.
2. Evaluasi terhadap hasil capaian dari implementasi penadaan anjungan mandiri kepegawaian BKD Kota Malang, menunjukkan bahwa sistem aplikasi ini belum efektif dan efisien dalam hal pencapaian target operasionalisasi AMK di Tahun 2012 dikarenakan tingkat pengetahuan dan elektabilitas pengguna layanan terhadap aplikasi ini masih rendah.

2.1.1.4 Dari hasil penelurusan peneliti mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu, Perbandingan dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti yaitu, Dalam Penelitian Juwariyah, dengan Judul “Evaluasi Kebijakan Izin Reklame Di Kota Batam” meneliti kebijakan izin reklame yang mana tujuannya agar memudahkan masyarakat untuk mengurus izin reklame, 2. Penelitian oleh Arif Siswadi dengan Judul “Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara” dengan tujuan penelitian mengevaluasi penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara, 3. Penelitian Oleh Ratih Anggraeni, Soesilo Zauhar, Siswidiyanto dengan Judul “Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Daerah Kota Malang” dengan tujuan penelitian mengevaluasi pengadaan anjungan tepat waktu sebelum tahun anggaran. Maka, setelah memahami dan membandingkan penelitian terdahulu dengan mengetahui

keaslian dan keabsahan datanya dengan demikian dapat menambah ilmu peneliti hingga dapat mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2022*, dengan memperhatikan masalah yang ada, peneliti memfokuskan untuk mendeskripsikan, mendalami, dan menganalisis evaluasi kebijakan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah tahun 2022 (Studi Kasus: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah) maka, dengan ini penelitian yang akan diteliti oleh peneliti layak dilaksanakan penelitiannya.

2.1.2 Pengertian Administrasi Publik

2.1.2.1 Administrasi

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Fadjar S. Arifin. (2020:7) administrasi dapat dijelaskan sebagai suatu proses atau aktivitas yang berkaitan dengan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut The Liang Gie (2009:9) dalam bukunya administrasi perkantoran modern mengatakan bahwa administrasi memiliki pengertian dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Hal tersebut menyelesaikan bahwa serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru karena dia telah timbul bersama- bersama dengan timbulnya pemidahan manusia. Dari administrasi yang telah dijelaskan, The Liang Gie (1993) dalam Darmanto (2012: 1.7), menyatakan rangkaian dalam kegiatan administrasi yaitu mencakup beberapa ciri nya sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang tau lebih) dengan rasional
- b. Administrasi merupakan suatu proses akan kerja sama
- c. Dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang yang luas dan melibatkan berbagai konsep, teori, dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai studi tentang pengelolaan organisasi dan kegiatan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Ruang lingkup administrasi publik meliputi perencanaan kebijakan publik, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Tujuan administrasi publik adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Yandri & Putri, 2021 : 35).

Administrasi publik memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat. Pada awalnya, administrasi publik terkait dengan pengelolaan birokrasi dan administrasi pemerintahan (Hidayah, 2020 : 28). Namun, seiring waktu, peran administrasi publik berkembang menjadi lebih kompleks dan melibatkan manajemen sumber daya, perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang efektif.

Administrator publik berperan sebagai pemimpin dan pengelola dalam pemerintahan (Ningtyas, 2017 : 2). Mereka bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik serta program-program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab administrator publik meliputi pengelolaan sumber daya, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, menjaga integritas dan etika dalam pelayanan publik, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan pemerintah.

Berikut ini adalah teori-teori administrasi publik dan konsep-konsep penting dalam administrasi publik adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Birokrasi merupakan salah satu teori administrasi publik yang paling terkenal, dikembangkan oleh Max Weber. Teori ini menggambarkan karakteristik birokrasi yang mencakup hierarki, spesialisasi tugas, aturan dan prosedur yang jelas, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dan penilaian berdasarkan kemampuan dan kompetensi. Teori Birokrasi berfokus pada efisiensi, prediktabilitas, dan rasionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dewi, 2017 : 177).
- 2) Teori Keputusan dalam administrasi publik berfokus pada proses pengambilan keputusan dalam konteks pemerintahan. Teori ini melibatkan analisis keputusan, evaluasi risiko, model pengambilan keputusan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang efektif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menerapkan strategi pengambilan keputusan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan (Asna, 2012 : 18).
- 3) Teori Manajemen Publik berkaitan dengan konsep dan praktik manajemen yang digunakan dalam konteks pemerintahan. Teori ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pemerintah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif (Chowdhury & Shil, 2021 : 40).

Konsep-konsep Penting dalam Administrasi Publik:

- 1) Akuntabilitas: Merujuk pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat (Kutika et al., 2021).
- 2) Efisiensi: Mencerminkan penggunaan sumber daya yang efektif dan hemat dalam mencapai tujuan pemerintah (Ningtyas, 2017).
- 3) Efektivitas: Merujuk pada sejauh mana pemerintah mencapai hasil yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Putri & Mutiarin, 2018).

- 4) Partisipasi Publik: Melibatkan partisipasi aktif dan inklusif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Memahami teori-teori administrasi publik seperti teori birokrasi, teori keputusan, dan teori manajemen publik, serta konsep-konsep penting seperti akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi publik, membantu para administrator publik dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dengan lebih baik. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja dan panduan praktis dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pembuatan keputusan.

2.1.2.3 Organisasi

Menurut Grenberg dan Baron yang dikutip dalam buku "Perilaku Organisasi" karya Dr. H. Candra Wijaya, M.Pd., organisasi merupakan sebuah sistem sosial terstruktur yang terdiri dari kelompok dan individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati. Organisasi adalah sebuah entitas sosial yang terkoordinasi, terdiri dari dua orang atau lebih, yang secara relatif berkelanjutan bekerja untuk mencapai tujuan (Robbins dan Judge, 2011:36). Organisasi dapat memiliki tujuan bersama atau beragam. Organisasi juga dianggap sebagai sistem yang terkoordinasi secara sadar oleh dua orang atau lebih (Keitner dan Kinicki, 2010:5).

Dalam buku "Perilaku Organisasi" karya Timotius Duha, S.E., MM. yang dikarang oleh James L Gibson, dkk (1985), disebutkan bahwa organisasi merupakan sebuah entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu secara perorangan. Mulyadi (2007:181) menyatakan bahwa pada dasarnya, organisasi adalah sekelompok orang yang saling bergantung satu sama lain dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu.

Tre Watha dan Newport dalam Winardi (2004:53) mendefinisikan

organisasi sebagai sebuah struktur sosial yang dirancang untuk mengoordinasikan kegiatan dua orang atau lebih melalui pembagian kerja dan hierarki otoritas, dengan tujuan mencapai tujuan umum tertentu. Edgar H. Schein, yang dikutip dalam Winardi (2011:27), berpendapat bahwa semua organisasi memiliki empat karakteristik berikut; koordinasi upaya, tujuan umum bersama, pembagian kerja, dan hierarki otoritas.

2.1.3 Konsep Kebijakan Publik

2.1.3.1 Kebijakan

Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Widodo 2007:13).

Menurut Anderson (2002:12) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan berkaitan dengan tindakan.

Sebagaimana diungkapkan Suskind, seorang penulis yang dekat dengan pejabat Gedung Putih masa George W. Bush, "ketika kita melakukan tindakan berarti kita telah membuat suatu realitas, dan ketika kita membuat tindakan baru, maka kita juga membuat realitas baru" (Fischer et al., 2007).

Post, et al (1999) memaknai kebijakan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang mempengaruhi kehidupan penduduk negara secara substantial.

Greer and Paul Hoggett (1999) memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikan kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan suatu entitas dengan upaya meningkatkan nilainya. Dalam konteks pemerintahan suatu negara, tugas sebenarnya dari pemerintah atau negara adalah tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar memiliki nilai yang lebih tinggi melalui implementasi kebijakan publik.

Kebijakan publik merujuk pada tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah atau isu-isu yang dianggap penting dalam masyarakat (Putri & Mutiarin, 2018). Kebijakan publik mencakup berbagai tindakan seperti peraturan, undang-undang, program-program, dan inisiatif-inisiatif yang dirancang untuk memengaruhi perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam masyarakat (Kristiyanto, 2016 : 231).

Dye (2002:1) mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam buku berjudul *Public Policy making*, Anderson (2000) pun setuju dengan pandangan Dye tentang makna kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.

Dalam kesempatan lain, Anderson (dalam *Hill and Hupe* 2002) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan badan-badan pemerintahan.

Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap

pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

2.1.4 Konsep Evaluasi Kebijakan

2.1.4.1 Evaluasi

Evaluasi merupakan serangkaian proses dengan mengumpulkan, menganalisis hingga mengkaji informasi terhadap suatu objek yang akan di evaluasi, dengan membandingkan atas hasil keseluruhan menggunakan indikator evaluasi (Wiraman dalam Asiong Munth, 2015), sehingga menghasilkan keputusan, ketentuan mengenai objek evaluasi dan dapat menilai apakah program tersebut berhasil atau gagal sesuai pada indikator yang telah ditentukan.

Jones dalam Debby Kawengian (2015), mengartikan bahwa: *“Evaluation is an activity designed to judge the merits of goverment programs which varies significantly, the method of analysis and forms of recommendation”*.

Definisi diatas dapat di simpulkan bahwa evaluasi kebijakan yaitu aktivitas yang dirancang agar bisa melihat manfaat dari program pemerintah, yakni memiliki variasi yang signifikan dengan berdasarkan kebijakan lebih spesifik tergantung apa yang sedang terjadi di masyarakat, dan dibentuk dengan metode analisis juga bentuk rekomendasi.

Menurut Brinkerhoff (1968: ix) dalam Ashiong P Munthe (2015), memiliki tujuh elemen tahap yang harus dilakukan pada tahapan pelaksanaan evaluasi diantaranya, yaitu:

1. Menentukan fokus yang akan di evaluasi (*Focusing the evaluation*)
2. Penyusunan desain evaluasi (*Designed the evaluation*)
3. Pengumpulan informasi (*Collecting information*)
4. Analisis dan interpretasi informasi (*Analizing and interpreting*)
5. Pembuatan laporan (*Reporting information*)
6. Pengelolaan informasi (*Managing evaluation*)

7. Evaluasi untuk evaluasi (*Evaluating Evaluating*)

Dari definisi diatas bahwa evaluasi sangat dibutuhkan dalam memanajemen hasil kinerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusia itu sendiri, maka dari itu tujuan evaluasi itu sendiri, yaitu:

- a. Untuk dapat mengetahui seberapa tingkat pemahaman atau kompetensi seseorang terhadap kinerja yang telah ditetapkan kepada nya.
- b. Agar dapat mengetahui seberapa kesulitan yang dihadapi seseorang dalam menjalankan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan evaluasi hingga dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapinya.
- c. Dapat menjadi umpan balik dari indormasi setiap pelaksanaan evaluasi sehingga dapat memperbaiki kegiatan yang kurang baik.
- d. Dan evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa efektif, efisiensi nya suatu metode atau cara yang sudah ditetapkan oleh pelaksananya.

2.1.4.2 Kajian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan bermaksud untuk menentukan hal strategis yang direncanakan dalam meningkatkan kinerja kebijakan, evaluasi dilaksanakan oleh evaluator sesuai dengan prosedur yang dapat bertanggung jawab tanpa menimbulkan kegusaran. Evaluasi kebijakan ini mencakup atas implementasi di lingkungan dan kinerja kebijakan, (Nugroho dalam kutipan Debby Kawengian, 2015)

Evaluasi dilakukan setelah program yang dikerjakan telah atau sedang berjalan, namun dalam Permatasari Amanda (2020: 37) menyatakan terdapat beberapa langkah dalam evaluasi kebijakan diantaranya identifikasi tujuan program, menganalisis masalah, deskripsi masalah, dan melihat standarisasi program, melakukan pengukuran kinerja pada setiap tahap perubahan, menciptakan perubahan dari penyebab masalah dan dari indikator penentu.

Maka evaluasi kebijakan baru dapat di evaluasi jika program tersebut sudah terlaksana jadi, evaluator dapat mengukur kinerja dan mengidentifikasi masalah terhadap kebijakan, Joner dalam Debby Kawengian (2015) mengemukakan pada

dasarnya evaluasi kebijakan mencakup pelaksanaannya untuk tiga tujuan, yaitu:

1. Evaluasi bersifat politis, yaitu evaluasi ini untuk melihat seberapa besar manfaat program tersebut untuk negara.
2. Evaluasi yang bersifat organisasional, artinya dilaksanakan dengan tujuan dapat mengetahui jawaban tentang kebijakan yang dilakukan.
3. Evaluasi yang substantif atau bersifat nyata, artinya dilakukan untuk melihat kebijakan atau program yang sudah mencapai tujuan hingga dampak kebijakannya.

2.1.4.3 Evaluasi Kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022

LPPD merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang biasa dilaksanakan pada akhir anggaran di akhir tahun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 27 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, yang tata cara dan substansi materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Maka, setelahnya LPPD dijadikan sebagai sarana evaluasi bagi Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai kinerja penyelenggaraan serta kebijakan yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 sebagai motivasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Evaluasi kebijakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah Kebijakan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung tahun 2022 sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam Peraturan Perundang-undangan.

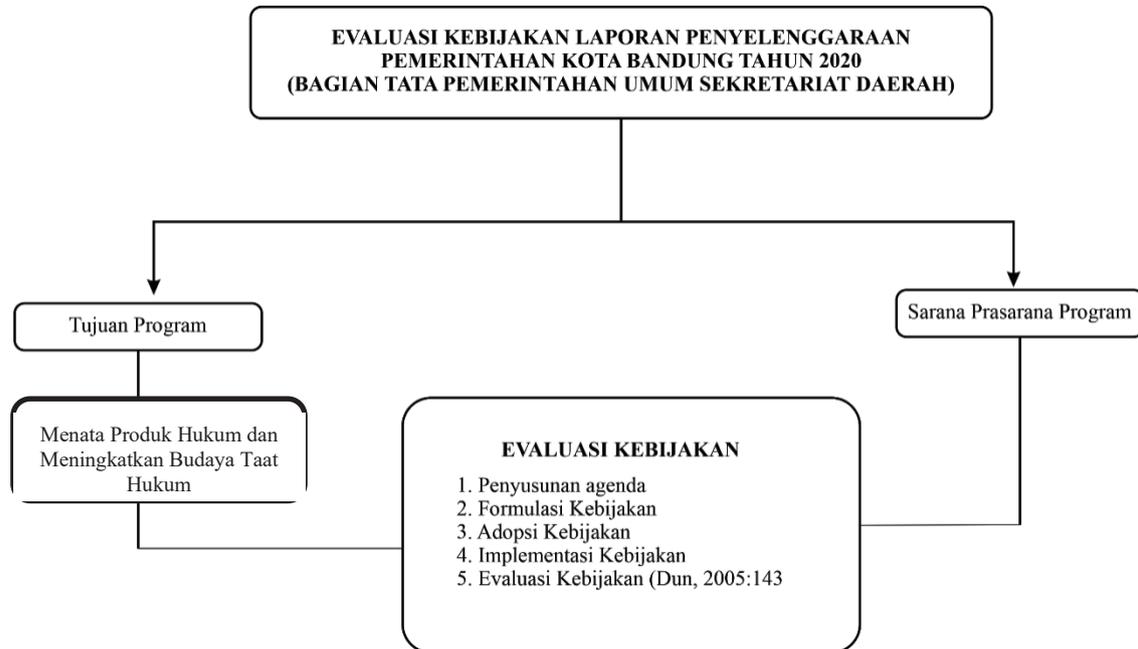
2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir adalah suatu model konseptual sebagaimana memiliki teori yang berhubungan dengan faktor-faktor variabel yakni telah diidentifikasi sebagai masalah penting yang akan dirumuskan sebagai pemecahan masalah.

Maka, dalam penelitian ini peneliti mengambil suatu teori yang akan menjadi kerangka acuan dan pedoman dari alur penelitian. Alur berpikir pada penelitian Evaluasi Kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022 (Studi Kasus Bagian Tata Pemerintah Umum Sekretariat Daerah) menggunakan teori dari William Dunn dan Edward (2005:143). Yang dalam melakukan penilaiannya mengacu pada empat indikator yang menentukan keberhasilan Evaluasi Kebijakan, diantaranya:

1. Penyusunan Agenda
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan (Dunn, 2005:143)

Teori ini sangat cocok dijadikan acuan dalam penelitian ini, karena sangat berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Maka, untuk lebih jelasnya peneliti menggambarkan bagan kerangka pemikiran seperti dibawah ini:



Gambar 2. 1. Bagan Kerangka Berpikir

2.3 Proposisi

Proposisi merupakan dugaan sementara, memiliki pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya dapat dinilai benar atau salah, dengan itu peneliti memiliki proposisi sebagai berikut:

Pelaksanaan Kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022, masih belum efektif dalam pelaksanaannya.